

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN 2020**



JAKARTA, JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2020 disusun untuk menyampaikan komitmen penerapan Reformasi Birokrasi dalam mencapai target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer Utama kepada Kepala Pengadilan Militer Utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2020.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, kami mohon dukungan dan bantuan serta doa agar Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan benar.



Jakarta, Januari 2020
Kepala Pengadilan Militer Utama,

**Agus Dhani Mandaladikari, S.H.,
M.Hum
Mayor Jenderal TNI**

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	3
BAB III PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Panitera dan Sekretaris sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan di era reformasi ini Pengadilan Militer Utama harus dapat mengakomodir keinginan yang berkembang dalam masyarakat pencari keadilan guna meningkatkan kemandirian, kewibawaan dan citra Badan Peradilan, dengan demikian perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bebas KKN.

Oleh karena itu, sebagai bagian institusi yang bertanggung jawab dibidang penegakan hukum, Pengadilan Militer Utama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu membuat suatu Perjanjian Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Maksud :

Maksudnya adalah Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran yang akan di laksanakan Pengadilan Militer Utama di Tahun Anggaran 2020

- Tujuan :

a. Tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi pencegahan korupsi.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah dan penyelesaian perkara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

b. Sedangkan Tujuan Khususnya adalah :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur Negara.
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun) yang dilanjutkan dengan penjabaran lebih lanjut secara terperinci dalam setiap tahun. Kemudian Perjanjian Kinerja tersebut diajukan dan disetujui sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Renstra, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Perjanjian Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan Anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan Dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. Dasar Hukum

Yang mendasari Perjanjian Kinerja Tahunan adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 12 November 2017 Hal Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

B. Hakikat Perjanjian Kinerja.

Hakikat dari Perjanjian Kinerja bagi satuan kerja adalah :

- a. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
- b. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- c. Perjanjian Kinerja merupakan kesempatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).
- d. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
- e. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

C. Isi Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Aparatur adalah ;

- a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur
- b. Lampiran yang berisi :
 - Program-program Utama;
 - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*Outcome*);
 - Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa Indikator Kinerja *Output* dan atau *Outcome*; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

D. Pernyataan Perjanjian Kinerja & Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020

**PERJANJIAN KINERJA
PANITERA
PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN 2020**



PENGADILAN MILITER UTAMA
Jl. Raya Penggilingan Cakung
Telp/Fax : (021) 48701705 - Jakarta Timur 13940
E-mail : dilmiltama1@yahoo.co.id

Jakarta, Januari 2020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI UTAMA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kolonel Sus. Tutut Dyah R. S.H., M.H

Jabatan : Panitera Pengadilan Militer Utama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Utama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

**Panitera Pengadilan Militer Utama
Pihak Pertama**

**Tutut Dyah R., S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524581**



**Kepala Pengadilan Militer Utama
Pihak Kedua**

**Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Kerja : Pengadilan Militer Utama
 Tahun Anggaran : 2020

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
			Persentase jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
			Persentase jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	100%
			Persentase jumlah perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	80%
			Persentase penurunan sisa perkara	50%
			Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer	100%
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Kerja : Pengadilan Militer Utama
Tahun Anggaran : 2020

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100%
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80%

Anggaran Kegiatan Manajemen Peradilan Militer

Rp. 461.997.000,-

Jakarta, Januari 2020

Panitera Pengadilan Militer Utama
Pihak Pertama



Tutut Dyah R., S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524581



Kepala Pengadilan Militer Utama
Pihak Kedua

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN 2020**



PENGADILAN MILITER UTAMA
Jl. Raya Penggilingan Cakung
Telp/Fax : (021) 48701705 - Jakarta Timur 13940
E-mail : dilmiltama1@yahoo.co.id

Jakarta, Januari 2020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER UTAMA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Brigjen TNI Catur Sulasdiarso, S.Sos., SH., M.Si., (Han).

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Utama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

**Kepala Pengadilan Militer Utama
Pihak Kedua**

**Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI**

**Sekretaris Pengadilan Militer Utama
Pihak Pertama**

**Catur Sulasdiarso, S.Sos., SH., M.si., (Han).
Brigadir Jenderal TNI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Kerja : Pengadilan Militer Utama
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%
		Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp 6.124.008.000,-
Terdiri dari :

1. Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.I. Rp. 6.009.008.000,-
2. Anggaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp 25.000.000,-

Jakarta, Januari 2020



Kepala Pengadilan Militer Utama
Pihak Kedua

Agus Dhanu Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Sekretaris Pengadilan Militer Utama
Pihak Pertama

Catur Sulasdiarso, S.Sos., SH., M.si., (Han).
Brigadir Jenderal TNI.

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Militer Utama. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini diawali dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun) yang dilanjutkan dengan penjabaran secara terperinci dalam setiap tahun kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Militer Utama menyusun Perjanjian Kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan. Dokumentasi Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Utama ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Utama dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Militer Utama sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.